

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Profil Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, juga merupakan pusat perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangannya sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada  $5^{\circ} 20'$  sampai dengan  $5^{\circ} 30'$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ} 28'$  sampai dengan  $105^{\circ} 37'$  Bujur Timur. Ibukota propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah  $197,22\text{km}^2$ .

Wilayah administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan, 126 Kelurahan. Di bawah disajikan detail keseluruhan nama kecamatan beserta jumlah kelurahan berikut luas wilayah per kecamatan di Kota Bandar Lampung. Berikut dalam tabel:

**Tabel 2. Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Bandar Lampung per kecamatan (km<sup>2</sup>)**

No	Kecamatan	Ibukota	Kelurahan	Luas
1	Teluk Betung Barat	Bakung	5	11,02
2	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuan	6	3,79
3	Panjang	Karang Maritim	8	15,75
4	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	5	2,03
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6	4,33
6	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7	4,05
7	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	7	14,99
8	Kemiling	Beringin Jaya	9	24,24
9	Teluk Betung Timur	Sukamaju	6	14,83
10	Enggal	Enggal	6	3,49
11	Kedaton	Kedaton	7	4,79
12	Rajabasa	Rajabasa	7	13,53
13	Tanjung Seneng	Tanjung Seneng	5	10,63
14	Sukarame	Sukarame	6	14,75
15	Sukabumi	Sukabumi	7	23,60
16	Kedamaian	Kedamaian	7	8,21
17	Bumi Waras	Sukaraja	5	3,75
18	Langkapura	Langkapura	5	6,12
19	Labuhan Ratu	Kp. Baru Raya	6	7,97
20	Way Halim	Way Halim Permai	6	5,35
Jumlah			126	197,22

Sumber : BPS Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2014

#### 4.1.1 Topografi

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:

1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang
2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara
3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat disekitar Tanjung Karang bagian barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur Selatan
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

#### 4.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen). Penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 berjumlah 942.039 jiwa. Penyebaran penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Panjang sebanyak 71.495 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Enggal, sebanyak 27.019 jiwa. Secara lengkap, disajikan pada tabel jumlah penduduk berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Teluk Betung Barat	14.797	13.874	28.671
2	Teluk Betung Selatan	19.224	18.640	37.864
3	Panjang	36.346	35.149	71.495
4	Tanjung Karang Timur	17.838	17.865	35.703
5	Teluk Betung Utara	25.603	24.311	48.679
6	Tanjung Karang Pusat	24.332	24.857	49.189
7	Tanjung Karang Barat	26.702	25.938	52.640
8	Kemiling	31.479	31.674	63.153
9	Teluk Betung Timur	20.608	19.462	40.070
10	Enggal	13.179	13.840	27.019
11	Kedaton	23.592	23.605	47.197
12	Rajabasa	23.570	22.640	46.210
13	Tanjung Seneng	22.056	21.986	44.042
14	Sukarame	27.436	27.329	54.765
15	Sukabumi	28.274	26.908	55.182
16	Kedamaian	25.603	24.998	50.601
17	Bumi Waras	27.882	26.713	54.595
18	Langkapura	16.498	16.159	32.657
19	Labuhan Ratu	21.772	21.373	43.145
20	Way Halim	29.483	29.679	59.162
	Jumlah	475.039	467.000	942.039

Sumber : BPS Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2014

### 4.1.3 Kondisi Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penerimaan sumbangan dari tiap lapangan usaha di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 paling tinggi disokong oleh keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Secara detail pertumbuhan kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2010-2013 ditampilkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4. Distribusi PDRB Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2013**

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
Pertanian	257.527	262.576	267.985	273.599
Pertambangan dan Penggalian	82.616	85.284	88.244	90.338
Industri Pengolahan tanpa Migas	1.204.464	1.270.017	1.345.288	1.416.090
Listrik dan Air Bersih	40.636	41.743	42.914	44.087
Bangunan	472.016	488.366	508.730	530.383
Perdagangan Hotel dan Restoran	1.097.399	1.142.003	1.189.185	1.249.161
Pengangkutan dan Komunikasi	1.015.910	1.085.907	1.164.349	1.235.433
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.462.350	1.651.462	1.839.099	2.046.676
Jasa-jasa	907.602	940.493	977.576	1.019.799
PDRB	6.540.521	6.967.851	7.423.369	7.905.567

Sumber: BPS Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2014

#### 4.1.4 Rumah Tangga Miskin

Meskipun secara perekonomian Kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan akan tetapi jumlah rumah tangga yang berstatus menengah kebawah di Kota Bandar Lampung berdasarkan data PPLS Tahun 2011 masih di atas angka 30% yaitu sebanyak 33,83 persen atau tepatnya sebanyak 72.499 rumah tangga. Dengan perincian sebanyak 7.818 rumah tangga (10,78%) termasuk kategori sangat miskin, 8.107 rumah tangga (11,18%) berkategori miskin, 21.525 rumah tangga (29,69%) rumah tangga berkategori hampir miskin, 35.049 rumah tangga (48,34%) berkategori rentan miskin. Secara lengkap, per kecamatan akan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Jumlah Rumah Tangga Hasil Pendataan BPS (PPLS Tahun 2011)**

No	Kecamatan	Sangat miskin	Miskin	Hampir miskin	Rentan miskin	Total	% Jml RT
1	Teluk Betung Barat	1.143	1.096	2.683	3.229	8.151	60,62
2	Teluk Betung Selatan	1.793	1.566	3.510	5.328	12.197	55,74
3	Panjang	642	680	1.779	2.235	5.336	33,71
4	Tanjung Karang Timur	519	636	2.077	3.369	6.601	31,05
5	Teluk Betung Utara	595	623	1.742	2.853	5.813	39,66
6	Tanjung Karang Barat	372	452	1.351	2.646	4.821	32,28
7	Tanjung Karang Pusat	758	695	1.729	3.092	6.274	35,92
8	Kemiling	426	541	1.449	2.202	4.618	26,65
9	Kedaton	429	563	1.634	3.265	5.891	25,42
10	Rajabasa	286	275	762	1.238	2.561	20,86
11	Tanjung Seneng	166	199	587	983	1.935	19,78
12	Sukarame	266	306	999	2.875	4.446	25,96
13	Sukabumi	423	475	1.223	1.734	3.855	25,46
	Jumlah	7.818	8.107	21.525	35.049	72.499	33,83

Sumber: BPS Kota BL, Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Cluster RTSM di Kota Bandar Lampung Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah rumah tangga menengah ke bawah di Kota Bandar Lampung masih berada di atas angka 30%, sedangkan

untuk kategori keluarga sangat miskin dan keluarga miskin di atas angka 20%. Jumlah rumah tangga miskin yang masih tinggi, memacu pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan, salah satu program unggulan pengentasan kemiskinan adalah kegiatan rehabilitasi/bedah rumah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) untuk dapat melaksanakan program tersebut.

## **4.2 Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Kota Bandar Lampung**

### **4.2.1 Struktur Organisasi**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Perda Kota Bandar Lampung tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Kota Bandar Lampung.

Susunan organisasi Badan pemberdayaan dan Pemerintahan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
  - a. Sub bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan
4. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya, membawahi:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya
5. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi:
  - a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
  - b. Sub Bidang Pengembangan Potensi Kelurahan (Sub.bidang yang melaksanakan Pogram Bedah Rumah)
6. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
  - a. Sub Bidang Pendayagunaan Sumberdaya Alam
  - b. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kelurahan Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Kelurahan Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan.
- c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi rakyat, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.
- d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2.3 Tugas BPMPK dalam program Bedah Rumah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung, dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah Kota Bandar Lampung berfungsi sebagai Ketua pelaksana kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah Kota Bandar Lampung, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengarah, memberikan motivasi dan arahan-arahan kepada seluruh personil pelaksana kegiatan agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan serta kebijakan yang berlaku.

2. Koordinator, mengkoordinir segala masukan baik yang berkaitan dengan administrasi maupun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 3 Penanggung jawab, bertanggung jawab atas seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan monitoring bedah rumah dan membuat laporan akhir kegiatan.
- 4 Melaksanakan revisi juklak-juknis kegiatan pengendalian dan monitoring bedah rumah dan membuat laporan akhir kegiatan.
- 5.Melakukan monitoring/evaluasi/verifikasi administrasi keadaan di lapangan mulai dari mulai usulan yang disampaikan kurang mampu melalui RT, LK dan Lurah.
- 6 Menyusun laporan akhir kegiatan sebagai pertanggung jawaban kepada Walikota Bandar Lampung.

### **4.3 Program Bantuan Bedah Rumah Kota Bandar Lampung**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Program Bedah Rumah merupakan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dan merupakan tindak lanjut dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Gambaran secara umum Program Bedah Rumah di kota Bandar Lampung adalah program tersebut setelah dirumuskan anggarannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dalam implementasinya direalisasikan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ perbaikan fisik rumah tidak layak huni milik

masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Rehabilitasi dilakukan baik sebagian maupun menyeluruh sesuai dengan anggaran yang disalurkan, sehingga dengan rehabilitasi, rumah minimal memenuhi kelayakan dan kesehatan. Pelaksana kegiatan dalam implementasi program Bedah Rumah dengan pengguna anggaran adalah Badan pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMPK), dan tidak dilakukan dengan tender/pelelangan pekerjaan yang diserahkan kepada kontraktor/pemenang tender. Namun anggaran disalurkan kepada masyarakat penerima kebijakan melalui rekening mereka yang disalurkan oleh Bank Lampung dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan bantuan tenaga pendamping sosial.

Kriteria masyarakat yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Penerima bantuan adalah penduduk asli Kota Bandar Lampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga.
2. Rumah dan tanah adalah hak milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan dari pejabat yang berwenang atau dari Lurah setempat.
3. Belum pernah menerima bantuan bedah rumah/serupa dari pemerintah
4. Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat kurang mampu
5. Rumah tempat tinggal tidak layak huni dengan ketentuan:
  - Lantai tanah
  - Dinding geribik/papan
  - Atap rusak berat
  - Sanitasi buruk.

Dukungan perangkat kebijakan berupa peraturan yang menjadi landasan dalam implementasi kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Bandar Lampung Tahun 2014 meliputi:

1. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah Kota Bandar Lampung.
2. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 391/III.17/HK/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah Program peningkatan Kualitas Kualitas Perumahan Kota Bandar Lampung tahun 2014
3. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 49/III.17/HK/2014 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi/Bedah Rumah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2014
4. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 391/III.17/HK/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah
5. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 580/III.17/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi/Pengawas Lapangan Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2014.

#### **4. 4 Karakteristik Informan Pelaksana Program**

Sebagaimana disebutkan, implementasi Program Bantuan Bedah Rumah di Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan kuasa pengguna anggaran adalah Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kota Bandar Lampung selaku *leading sector*, maka penanggung jawab pelaksanaan implementasi program adalah aparat pemerintah (SDM) di lingkungan instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Kelurahan. Pelaksana program yang menjadi informan dalam penelitian adalah para pengelola/pelaksana yang berkompeten di pemerintahan, yaitu di kantor BPMPK yang bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan bedah rumah, para stakeholder di lapangan. Jumlah informan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pelaksana dari BPMPK dan pelaksana lapangan.

**a. Jenis Kelamin Pelaksana Program**

Pengelola/petugas pelaksana di kantor BPMPK program sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan pelaksana lapangan sebanyak 8 orang terdiri dari 1 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Untuk lebih jelasnya klasifikasi jenis kelamin pelaksana program dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Jenis Kelamin Pelaksana Program**

No	Pelaksana	Laki -laki	%	Perem puan	%	Jml	%
1	BPMPK	3	25,00	1	8,33	4	33,33
2	Pelaksana lapangan	7	58,34	1	8,33	8	66,67
Jumlah		10	83,34	2	16,66	12	100,00

Sumber: hasil penelitian 2014

Jumlah informan ditataran pemerintahan masih didominasi laki-laki dengan kata lain bahwa pelaksana program Bedah Rumah di Kota Bandar Lampung sebagian besar adalah laki-laki.

#### **b. Tingkat Pendidikan Pelaksana Program**

Tingkat pendidikan pelaksana program dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Tingkat Pendidikan Pelaksana Program**

No	Pelaksana	S2	%	S1	%	SLTA	%	Jml	%
1	BPMPK	2	16,67	2	16,66	0	0	4	33,33
2	Pelaksana Lapangan	1	8,33	5	41,67	2	16,67	8	66,67
Jumlah		3	25,00	7	58,33	2	16,67	12	100,00

Sumber: hasil penelitian 2014

Tingkat pendidikan akan menentukan kemampuan seseorang dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengelolaan dan pengambilan keputusan. Karena dengan pendidikan yang tinggi seseorang akan memiliki perencanaan yang lebih matang, berfikir panjang dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan komunikasi, disposisi dan penempatan seseorang sesuai dengan kompetensinya.

Pada sajian tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 4 pelaksana program, dari kantor BPMPK menunjukkan bahwa 2 orang mempunyai pendidikan di atas Strata satu (S-1), sedangkan pada pelaksana lapangandari 8 pelaksana

program 5 diantaranya sudah mempunyai pendidikan starta satu (S-1). Ini menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan mereka rata-rata sudah berpendidikan di atas SLTA. Tingkat pendidikan sangat berperan dalam kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan menentukan setiap pelaksanaan program sehingga dimungkinkan bahwa dalam pelaksanaan program ini mereka dianggap sudah memahami program yang akan diimplementasikan. dan pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program.

#### **4.5 Karakteristik Masyarakat Penerima bantuan Program Bedah**

##### **Rumah**

Warga masyarakat penerima program adalah warga masyarakat miskin yang ditetapkan memenuhi persyaratan sesuai kriteria. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini ini sebanyak 9 orang. Informan diambil berdasarkan karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Mereka dipilih berdasarkan lokasi daerah penerima bantuan program Bedah Rumah. Kecamatan Panjang informan diambil dari Kelurahan Ketapang dan kelurahan Panjang Selatan yang mempunyai karakteristik berbeda. Kemudian untuk Kecamatan Teluk Betung Selatan informan diambil dari Kelurahan Sumur Putri sebagai kelurahan dengan jumlah penerima program Bedah Rumah terbanyak, dan dari kelurahan Tanjung Karang Barat. Berikut karakteristik informan di dalam tabel.

**a. Klasifikasi Umur Masyarakat/Sasaran**

**Tabel 8. Klasifikasi Umur Masyarakat/sasaran**

No	Jenis Kelamin	Masyarakat/ Sasaran	Persentase (%)
1	Di bawah 30 tahun	0	0
2	31- 40 tahun	5	55,56
3	41- 50 tahun	3	33,33
4	Di atas 50 tahun	1	11,11
	Jumlah	9	100,00

Sumber: hasil penelitian 2014

Masyarakat dengan klasifikasi umur 31-40 tahun mendominasi jumlah informan, yang tergolong jenjang usia produktif. Banyaknya usia klasifikasi ini pada informan mengindikasikan bahwa usia banyak berperan dalam proses partisipasi dalam masyarakat. Hal ini dimungkinkan berkaitan dengan keberanian dalam mengambil keputusan dan berpendapat.

**b. Klasifikasi Jenis Kelamin**

Karakteristik jenis kelamin dari informan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 9. Klasifikasi Jenis Kelamin Masyarakat/sasaran**

No	Jenis Kelamin	Masyarakat/ Sasaran	Persentase (%)
1	Laki- laki	8	88,89
2	Perempuan	1	11,11
	Jumlah	9	100,00

Sumber: hasil penelitian 2014

Dari jumlah masyarakat/sasaran penerima bedah rumah tersebut terlihat bahwa jumlah laki-laki lebih banyak. Sebanyak 8 orang atau 89,89% adalah laki-laki, sedangkan sisanya sebanyak 1 orang atau 11,11% adalah perempuan. Hal ini karena peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga merekalah yang banyak menerima bantuan rehabilitasi/bedah rumah di Kota Bandar Lampung. Sedangkan perempuan yang mendapat program ini karena mereka berkedudukan sebagai kepala keluarga. Disamping hal tersebut, dapat disinyalir bahwa aksesibilitas informasi bagi laki-laki lebih besar daripada perempuan. Laki-laki lebih terbuka dan lebih cepat menerima informasi karena mereka lebih banyak beraktivitas di luar rumah daripada perempuan sehingga mereka lebih cepat menerima informasi. Dalam ajakan berpartisipasi maka akan lebih cepat direspon oleh laki-laki.

### c. Klasifikasi Tingkat Pendidikan.

**Tabel 10. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Masyarakat/sasaran**

No	Tingkat Pendidikan	Masyarakat/ Sasaran	Persentase (%)
1	SD	5	55,56
2	SLTP	3	33,33
3	SLTA	1	11,11
	Jumlah	9	100,00

Sumber: hasil penelitian 2014

Sehubungan dengan tingkat pendidikan ini, masyarakat penerima kebijakan berlatar belakang pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar dan tamat Sekolah

Dasar lebih mendominasi. Kecenderungan minimnya tingkat pendidikan akan berkaitan dengan keterbelakangan dan kemiskinan.

#### d. Klasifikasi Pekerjaan

**Tabel 11. Klasifikasi Jenis Pekerjaan Masyarakat/sasaran**

No	Pekerjaan	Masyarakat/ Sasaran	Persentase (%)
1	Nelayan	1	11,11
2	Buruh	6	66,67
3	Lainnya	2	22,22
	Jumlah	9	100,00

Sumber: hasil penelitian 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dilihat dari jenis pekerjaan, masyarakat penerima bantuan yang dijadikan sebagai informan lebih dari separuhnya atau sebanyak 66,67% bekerja sebagai buruh dan tingkat pendidikan yang rendah.

#### e. Klasifikasi menurut besarnya pendapatan

**Tabel 12. Klasifikasi menurut besarnya pendapatan**

No	Besarnya pendapatan	Masyarakat/ Sasaran	Persentase (%)
1	500.000 - 750.000	8	88,89
2	750.000 - 1.000.000	1	11,11
3	≥ 1.000.000	0	0
	Jumlah	9	100,00

Sumber: hasil penelitian 2014

Pada sajian data di atas, menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat penerima bantuan program bedah rumah 88,89% mempunyai pendapatan

antara Rp.500.000 – Rp.750.000. Pendapatan yang kecil tersebut habis untuk biaya makan, pendidikan, dan yang lainnya, sehingga mereka tidak dapat menyisihkan untuk biaya perbaikan rumah.

Karakteristik informan dari masyarakat penerima bantuan Program Bedah Rumah tersebut merupakan karakteristik dasar masyarakat yang menerima bantuan Program Bedah Rumah di Kota Bandar Lampung yang diasumsikan berkaitan erat atau mempengaruhi proses implementasi jika tidak didampingi oleh pendamping sosial yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam implementasi program.